

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA UTEUN GEULINGGANG, KRUENG GEUKUEH, ACEH UTARA

Wulan Indah Diana¹⁾, Cut Muftia Keumala²⁾

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe
stie@stie-lhokseumawe.ac.id¹⁾, xxx@xxxx.xxx²⁾

Abstract

This study aims to examine the Influence of Transparency and Accountability of Village Fund Management To The Performance of Uteun Geulinggang Village Government, Krueng Geukueh, North Aceh. Data used in this research is primary data as many as 38 sample with purposive sampling technique. The method used to analyze between independent variables with dependent variable is multiple linear regression method and test of classical assumption. The simultaneous research results of transparency and accountability of village fund management have an effect on the performance of Village Government. While the results of partial research variables of transparency of village fund management have a significant effect on the performance of Village Government, accountability variable of village fund management also have a significant effect to the performance of Uteun Geulinggang Village Government, Krueng Geukueh Aceh Utara.

Keywords: *Transparency, Accountability and Performance of The Village Government*

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatu nya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan sampai kepada seluruh pelosok daerah, maka perlu dibentuk suatu Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat (Sugiarti, 2015). Desa terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa.

Menurut R. Bintarto (2012) Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan unsur-unsur fisiografis social ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat disitu hubungan dan pengaruh yang timbal balik dengan daerah-daerah lain. Kemudian menurut PJ. Bournen (2008) Desa adalah salah satu bentuk kunodari ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebayakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendakalam. Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu Desa.

Proses pengelolaan dana Desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana Desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana Desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Aceh yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi Desa dengan mengalokasikan dana Desa dalam APBD yang bersumber dari APBN.R. Bintarto (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mulgan (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggungjawab atas kinerjanya. Thoha (2007) menyatakan bahwa Governance menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Negara dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan bukan lagi pemerintah yang banyak memerintah, namun pemerintah yang sedikit memerintah atau pemerintah yang baik (better governance).

Dalam rangka penyelenggaraan good governance maka ketiga unsur yang berada dalam ruang governance harus dapat bekerja dengan baik. Unsur-unsur yang dimaksud tersebut adalah: state (Negara atau Pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat). Unsur-unsur tersebut akan berinteraksi menurut fungsi-fungsi yang harus dilakukannya. Pada masa yang akan datang diperlukan kerja sama dari unsur tersebut agar pemerintah benar-benar mampu memerintah (Desak Nyoman, 2015). Menurut (Sedarmayanti, 2011), transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2006), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan efektifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Ardianto (2007) transparansi Adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan member tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dan transparansi dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat daerah dan masyarakat.

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan Judul “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukueh, Aceh Utara”.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukueh, Aceh Utara yang terdiri dari Geuchik, Sekretaris, Tuha Peut, Tuha Lapan, Kaur dan Masyarakat yang bersangkutan. Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau mewakili populasi yang diteliti). Untuk menentukan minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui, maka digunakan metode Probability Sampling yaitu metode pemilihan sampel secara acak. Elemen-elemen populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel.

Adapun teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, (Sugiyono, 2011). Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebanyak 38 responden pada Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh Aceh Utara.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

1. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan melakukan : (a). Pengamatan (Observation), Pengamatan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mencermati dokumen- dokumen yang ada. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar dan nyata. (b). Angket/Kuesioner, Angket/kuesioner dalam penelitian adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi 2006). Angket tersebut berupa daftarcheck list yaitu berisi butir-butir pertanyaan yang terdiri dari lima pilihan jawaban atau sering disebut dengan skala likert. Skala likert yaitu skala yang berisi lima kategori jawaban.
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori guna mendukung data primer yang diperoleh selama penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku serta referensi- referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,002 lebih kecil dibandingkan nilai tingkat signifikansi (0,05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh Aceh Utara.
2. Akuntabilitas pengelolaan dana Desa memiliki tingkat signifikansi, yaitu 0,004 lebih kecil dibandingkan nilai tingkat signifikansi, (0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh Aceh Utara.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Tingkat signifikansi untuk variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa terhadap kinerja Pemerintah Desa sebesar 0,00 hal ini menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh Aceh Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh Aceh Utara.
2. Akuntabilitas pengelolaan dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh Aceh Utara.
3. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Desa Uteun Geulinggang, Krueng Geukuh Aceh Utara.

REFERENSI

- Ardianto. 2007. Peran transparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik di Kabupaten Malang, Jawa Timur Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI Penerbit PT. Rineka Citra. Jakarta.
- Antosius, F. Alijoyo. 2003. *Corporate Governance*, Edisi Kesatu. Prenhalindo. Jakarta.
- A Dale, 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Reformasi Pelayanan Publik*, Airlangga University Press. Surabaya.
- Amirruddin. 2012. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur*. Journal, Vol.II No. 1 April 2012.
- Desak Nyoman Tri Wandari. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Buleleng*, e-Journal, Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015).
- Didjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa*. Rajawali Pers. Bukit Besar. Faisal. 2003. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan*. Jurnal SNA X. Herwidayatmo. 2003. *Penerapan Prinsip GCG di Pasar Modal Indonesia*, Investor Indonesia.
- Halim Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Krina P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi. Sekertariat Good Public Governmance*, Badan Perencanaan Pengembangan Nasional. Jakarta. Keban.
- Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Mulgan, R. 2010. *Accountability: An Ever-Expanding Concept*. Journal Public Administration, Vol.78, No. 3: 555-576
- Mangkunegara, A.P. 2009. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- John dan Nizam Jim Wiryawan. 2008. *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*, Edisi Kedua. Pelangi Cendekia. Jakarta.
- P.J Bournen, 2008. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Permana Irvan. 2012. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangandan Implikasinya pada Akuntabilitas*. Bandung.
- Pamungkas, 2014. *Teori Kepemimpinan dalam Manajemen*. Arrmurita. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Salim, WoodWard. 2011. *Perfomance function in company and public relation*. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2011. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Mandar M. Bandung. Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan keabsahan data R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiarti. Iis. 2015. *Pengaruh Budaya Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

- Toha, Suherman. 2007. Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha. Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Tunggal, Iman, Sjahputra, dan Amin Widjaya Tunggal. 2002. Memahami Konsep Corporate Governance, Edisi Kedua. Harvarindo. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Wibowo, Arie. Rossieta, Hilda. 2010.
- Faktor-faktor Determinasi Kualitas Audit: Suatu Studi Deskriptif. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian. Salemba Empat. Jakarta.